

**POHON KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN**

Misi RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023
"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*"
Tujuan : Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah
Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
Indikator Sasaran : Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan : Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas Kota
Indikator Tujuan : Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas

Sasaran : Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik
Indikator Sasaran : Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Indikator:

1. Jumlah dokumen peraturan bidang perhubungan yang ditetapkan (peraturan)
2. Jumlah layanan pendukung kinerja penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
3. Jumlah angkutan umum keluar/masuk terminal dalam 1 tahun
4. Jumlah titik/zona parkir yang diselenggarakan
5. Jumlah kendaraan umum/barang laik jalan yang lurus di kota Pangkalpinang
6. Jumlah layanan pendukung kinerja pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan jaringan jalan kab/kota
7. Jumlah layanan pendukung kinerja persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kabupaten/kota
8. Jumlah layanan pendukung kinerja audit dan inspektasi keselamatan LLAJ di jalan
9. Jumlah layanan pendukung kinerja penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kabupaten/kota
10. Jumlah layanan pendukung kinerja penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1(satu) daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota
11. Jumlah layanan pendukung kinerja penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
12. Jumlah layanan pendukung kinerja penertiban izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
13. Jumlah layanan pendukung kinerja penetapan tariff kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota



Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
Indikator: Jumlah ASN Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin

Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Indikator: Dokumen Penilaian Andalalin Tersusun

Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
indikator: Jumlah pengawasan pada rekomendasi andalalin di setiap bangunan

Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
Indikator: ASN yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
Indikator: Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal dalam 1 Tahun

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota dalam 1 Tahun

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Indikator: Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Dalam 1 Tahun

Perumusan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan kabupaten/kota
Indikator: jumlah dokumen kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan kabupaten/kota

Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan kabupaten/kota
Indikator : jumlah peserta sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan unyuk angkotan perkotaan kewenangan kabupaten/kota

Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Indikator: jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Indikator : jumlah peserta sosialisasi penetapan kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Indikator : jumlah pelaksanaan pengendalian rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota

Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota
Indikator: adanya Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota

Analisis tariff kelas ekonomi angkutan orang dan angkotan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Indikator: adanya Analisis tariff kelas ekonomi angkutan orang dan angkotan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: Adanya Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PANGKALPINANG

Drs. UBADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19641210 199202 1 006